

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Review Jurnal Terdahulu**

1. (Sudarsana dan Rahardjo, 2013)

Dengan adanya penelitian ini memiliki penjelasan bahwa tingkat kekayaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia, sedangkan temuan audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Sedangkan ukuran, belanja modal dan tingkat ketergantungan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah (ukuran, tingkat kekayaan, tingkat ketergantungan dan pengeluaran pemerintah) dan temuan audit terhadap kinerja pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah diukur dengan skor penilaian kinerja pemerintah daerah (EKPPD) yang berasal dari laporan penyelenggara pemerintah daerah (LPPD). Populasi penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Indonesia selama tahun 2010. Jumlah sampel sebanyak 367 pemerintah daerah dengan menggunakan purposive sampling.

2. (Marfiana, N dan Kurniasih, L, 2013)

Penelitian ini terkait dengan isu kinerja pemerintah daerah di Indonesia yang perlu ditingkatkan pasca otonomi daerah. Setiap pemerintah daerah perlu membangun dan mengelola sistem pengelolaan keuangan

publiknya sendiri. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah karakteristik pemerintah daerah dan hasil audit dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan rasio efisiensi. Dengan menggunakan analisis regresi berganda terhadap 94 sampel laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2011, penelitian ini mampu membuktikan bahwa tingkat ketergantungan dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Legislasi dan temuan audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan ukuran, kekayaan, dan opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah di Pulau Jawa.

3. (Devilia Susanti, Amri Amir, dan Wiwik Tiswiyanti, 2016)

Penelitian ini membahas tentang permasalahan kinerja pemerintah daerah di Indonesia sejak diberlakukannya otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengkaji pengaruh karakteristik pemerintah daerah, opini audit dan temuan audit terhadap kinerja pemerintah daerah yang diukur dengan Nilai Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) yang bersumber dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama karakteristik pemerintah daerah, opini audit dan temuan audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil pengujian secara

parsial menunjukkan bahwa karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, temuan audit berpengaruh signifikan terhadap opini audit. Sedangkan opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dan karakteristik pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit.

4. (Nasution dan Panggabean, 2017)

Pembiayaan pemerintah daerah tidak hanya mencerminkan arah dan pencapaian kebijakan fiskal untuk merangsang pembangunan pedesaan secara umum, namun juga menggambarkan sejauh mana tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada pemerintah daerah (kabupaten dan kota) dilaksanakan dalam konteks desentralisasi fiskal. Skala kinerja keuangan pemerintah menggunakan hubungan skala dan evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah dan kota di provinsi Sumatera Utara dalam konteks pemekaran daerah dengan menggunakan indikator kinerja keuangan yang diukur dengan pelaksanaan APBD tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Dalam penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan prestasi kerja di bidang keuangan yang meliputi anggaran dan pendapatan aktual dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui kebijakan atau ketentuan peraturan perundang-undangan pada periode tersebut. anggaran, sehingga semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dengan menggunakan PDB

(Produk Domestik Bruto) sebagai alat ukur yang berdampak pada peningkatan pendapatan.

5. (Tama dan Adi, 2018)

Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah, karakteristik pimpinan pemerintah daerah dan temuan audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan kabupaten/kota di Pulau Jawa sebagai populasi dan diambil sampel sebanyak 35 data kabupaten/kota. Peneliti menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari LKPD kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2009-2016 dan didukung oleh data non keuangan seperti usia, lama masa jabatan, dan pendidikan kepala daerah. Penelitian ini memberikan hasil bahwa ukuran dan karakteristik kepala daerah yang diproyeksikan berdasarkan lama masa kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2009-2016.

6. (Martantri, 2019)

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi dan leverage berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pemerintah daerah untuk menggunakan dana secara proporsional dan transparan sehingga dapat tercapai tata kelola pemerintahan yang baik.

7. (Neni Nurhayati dan Amir Hamzah, 2020)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Luas Wilayah Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Populasi penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Realisasi PDRB Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat periode 2014-2018. Penelitian ini menggunakan teknik quota sampling. Sampel dari penelitian ini berjumlah 150 data. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan luas wilayah pemerintah daerah secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Secara parsial Pertumbuhan Ekonomi dan Luas Wilayah Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

**B. Landasan Teori**

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi menjelaskan hubungan agensi antara agen dan prinsip -prinsip akan dikaitkan dengan pemerintah dan seluruh rakyat. Pada dasarnya, hubungan agensi diharapkan memiliki kontrak untuk menyerahkan wewenang kepada pihak lain atas nama pemerintah. Badan yang sering disebut kepala prinsipal akan memberikan kepercayaan kepada orang lain akan berisi kekuatan yang disebut agen dalam misi mereka untuk melakukan sesuatu yang dikonfigurasi.

Hubungan masyarakat dan pemerintah berdasarkan kepercayaan telah diamanahkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Dalam pemerintah Indonesia yang melangsungkan pemilihan umum di mana pemerintah dipilih secara langsung oleh masyarakat, ada tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah untuk memberikan lebih banyak layanan kepada masyarakat. Masyarakat akan mengawasi bagaimana pemerintahan berjalan, utamanya dalam mengelola keuangan untuk pelayanan publik yang dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan Menurut Mardiasmo (2009:20) menjelaskan bahwa bentuk kewajiban pemerintah dalam menunjukkan sifat transparan mengenai pengelolaan pemerintah kepada masyarakat dan ketika hal tersebut tidak terpenuhi, masyarakat berhak untuk meminta disebut akuntabilitas publik. Sudarsana dan Rahardjo (2013) berpendapat bahwa adanya prinsipal dan agen dalam sebuah organisasi rawan untuk menimbulkan konflik karena seringkali adanya perbedaan persepsi.

Pemerintah sebagai pemangku kepentingan harus dapat meningkatkan kinerja untuk memberikan kesejahteraan masyarakat semaksimal mungkin. Maka pemerintah wajib menggunakan sistem pengukuran kinerja secara berkala untuk mengetahui bagian mana yang kurang dan harus diperbaiki. Bantuan dari masyarakat merupakan faktor penting dalam merencanakan pemerintahan karena pemerintah diberikan amanah oleh masyarakat dan pemerintah wajib mempertanggungjawabkannya. Menurut Carr dan Browner (2000),

model keagenan memiliki dua pilihan yaitu suntikan dorongan kepada agen dalam mewujudkan keinginan prinsipal yang disebut *outcome-based* dan adanya kontrol dan pantauan oleh prinsip terhadap sikap agen yang disebut *behavioral-based*. Alat yang dapat digunakan untuk mengurangi masalah dalam hubungan keagenan adalah laporan keuangan dan transparansi segala kegiatan kepada prinsipal (Hendriyani dan Tahar, 2015).

Menurut Meisser, et al., (2006:7) memberikan pendapat bahwa asimetris informasi (*information asymmetry*), dan konflik kepentingan (*conflict of interest*) merupakan permasalahan yang sering ditimbulkan hubungan keagenan. Teori keagenan ini menjelaskan bahwa asimetri informasi sering terjadi karena adanya ketimpangan akses informasi antara agen dan prinsipal (Sudarsana dan Rahardjo, 2013). Asimetri informasi inilah yang menciptakan peluang untuk melakukan tindak kecurangan. Untuk mencegah adanya asimetri informasi, pemerintah daerah harus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi atas kinerja yang dilakukan (Dewinta dan Setiawan, 2016). Internet yang semakin canggih dapat dimanfaatkan sebagai media untuk mempublikasikan sebagai bentuk transparansi keuangan (Laswad *et.al*, 2005). Adapun Lee (2008) juga menyatakan laporan tahunan dapat dipergunakan sebagai bentuk transparansi karena menyajikan informasi kinerja yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan teori keagenan (*Agency Theory*), pengawasan merupakan faktor penting yang harus dikerjakan dalam memberi keyakinan bahwa manajemen yang dilakukan pemerintah sependapat dengan hukum yang sudah ditetapkan dan kebijakan yang diambil berorientasi pada kepentingan masyarakat. Otonomi daerah menuntut setiap pemerintah daerah agar dapat meningkatkan akuntabilitas publiknya. Peningkatan akuntabilitas publik akan menyebabkan informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih valid sehingga terjadi komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah.

## 2. Teori Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja adalah hasil persepsi yang dihasilkan dari bermacam-macam sikap yang dipunyai oleh seorang pegawai (Church, 1992). Banyak hal yang mampu mempengaruhi sikap dari seorang pegawai, salah satu diantaranya adalah memberikan penghargaan pada pegawai yang berprestasi. Penghargaan akan prestasi akan memunculkan perasaan bahagia dan bangga kepada diri pegawai dan pegawai akan cenderung meningkatkan bahkan akan di pertahankan. Dengan adanya hal tersebut secara tidak langsung akan menciptakan sikap positif dari para pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya.

Menurut pandangan Luthans (2011:141), kepuasan kerja dapat diartikan dengan hasil yang timbul dari sudut pandang setiap orang atas hasil pekerjaan yang telah diimplementasikan oleh para pegawai. Setiap individu memiliki sudut pandang masing-masing. Hal itu menunjukkan

bahwa kepuasan kerja setiap individu memiliki perbedaan dengan berdasarkan pada prinsip dan hal yang penting bagi masing-masing individu. Luthans (2011:141) kepuasan kerja di golongkan menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

- 1) Kepuasan kerja didefinisikan sebagai respon dari pekerjaan yang mereka jalani dalam bentuk emosi. Perilaku pegawai biasanya dapat mencerminkan hal tersebut.
- 2) Kepuasan kerja dapat dinilai berdasarkan besaran hasil yang mereka peroleh yang dibandingkan dengan harapan imbalan atas usaha yang telah dikorbankan, contohnya seseorang bekerja secara maksimal dengan harapan akan mendapatkan imbalan maksimal. Dengan terpenuhinya harapan pegawai akan meningkatkan kepuasan mereka dalam bekerja.
- 3) Kepuasan kerja dapat tercermin dari sikap pegawai. Sikap positif pegawai mencerminkan bahwa dirinya puas dengan pekerjaan yang mereka jalani.

Implementasi dalam penelitian ini adalah kepuasan kerja akan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan dalam meningkatkan kinerja suatu organisasi. Kebutuhan akan prestasi dan faktor manajemen perusahaan merupakan dua hal yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja.

Prestasi merupakan bagian dari pengakuan atas kinerja baik yang telah dilakukan karyawan dan akan menciptakan kepuasan kerja

baginya. Manajemen perusahaan pun turut menciptakan dan mendukung adanya kepuasan kerja bagi karyawan, bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang baik, sistem yang tertata.

### 3. Otonomi Daerah

Otonomi daerah memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengatur pemerintahannya secara mandiri (Bennet, 2010). Pemerintah daerah dibebaskan untuk mengatur pemerintahan termasuk mengelola dan menggali potensi daerah yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan memaksimalkan pengelolaan kekayaan potensi daerah ini diharapkan dapat melancarkan pembangunan di setiap daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah dituntut dapat mengelola potensi lokal daerah dengan pintar maka harapan pemerintah pusat dalam mengurangi ketergantungan pemerintah daerah akan terwujud (Ermawati dan Aswar, 2020).

Otonomi daerah menyebabkan perubahan pada setiap proses keuangan negara dari mulai perencanaan hingga pertanggungjawaban (Juweny, 2016). Desentralisasi bertujuan untuk menyediakan informasi dan transparansi segala kegiatan pemerintah dalam melayani kepentingan publik (Rusmin *et al.*, 2014). Sehingga pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan menjadi penting untuk diperhatikan dengan diberlakukannya otonomi daerah. Maka pemerintah daerah diharuskan menyusun LPPD untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan kepada publik.

#### 4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator dalam menentukan ketercapaian sebuah negara dengan berfokus pada kuantitas produksi suatu barang industri, perkembangan infrastruktur, perkembangan pendidikan, dan meningkatnya produksi atas barang modal dan peningkatan penyedia dan pengguna sektor jasa (Shabila, 2022). Pertumbuhan ekonomi juga didefinisikan sebagai proses peningkatan *output* atau keluaran per kapita dalam periode yang panjang (Boedino, 2013). Pertumbuhan ekonomi merujuk pada tingkat pertumbuhan *output* secara keseluruhan yang dapat diukur dengan tingkat pertumbuhan PDB atau Produk Domestik Bruto (Lipsey, 2008).

Perekonomian suatu negara mengalami pertumbuhan diindikasikan dengan pendapatan riil masyarakat yang mengalami peningkatan secara positif dari perbedaan tahun sebelum dan saat ini. Terdapat dua komponen untuk mengukur dan menilai pertumbuhan ekonomi yaitu, Produk Nasional Bruto (PNB) dan Produk Domestik Bruto (PDB). Faktor pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator dalam hal meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi yaitu faktor sumber daya manusia dan sumber daya alam (*resources*), pembentukan modal, faktor sosial dan politik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat suku bunga serta tingkat inflasi. Menurut Sukirno (2019) terdapat empat hal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yaitu:

- 1) Keberadaan tanah serta kekayaan alam memberikan akses yang memudahkan dalam mengembangkan perekonomian negara.
- 2) Kuantitas dan kualitas penduduk atau tenaga kerja mendukung tingkat produktivitas yang lebih cepat.
- 3) Peran teknologi dan barang-barang modal dinilai sangat penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi.
- 4) Faktor sosial dan perilaku masyarakat dalam ikut serta membangun pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang memiliki *multi effect* bagi perekonomian suatu negara yaitu meningkatkan pendapatan daerah yang mendorong aspek di bidang lain seperti investasi dan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi dapat dikategorikan sebagai tekanan isomorfisme koersif. Pertumbuhan ekonomi yang memiliki nilai positif mendorong atas peningkatan modal bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan serta meningkatkan kinerja yang baik dengan meningkatkan nilai investasi dan pendapatan asli daerah.

#### 5. Temuan Audit

Laporan keuangan yang baik dipengaruhi oleh hasil pemeriksaan yang dilakukan auditor. Semakin baik hasil pemeriksaan yang diberikan akan meningkatkan keyakinan publik terhadap laporan keuangan tersebut. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan

profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (UU No.15/2004). Audit sektor publik adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan publik dan sumber dananya berasal dari keuangan negara (Agung Rai, 2008:29). Pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan BPK tersebut berupa opini, temuan, kesimpulan atau dalam bentuk rekomendasi. Berdasarkan UU No. 15/2004 dan IHPS BPK, rincian temuan audit terhadap sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut:

- 1) Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan.
- 2) Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
- 3) Kelemahan Struktur Pengendalian Intern.

Menurut Bastian (2006) dalam Marfiana dan Kurniasih (2013), audit sektor publik memiliki perbedaan karena bersifat nirlaba, salah satu contohnya pemerintah daerah yang dinilai dan diperiksa adalah pengelolaan pemerintahannya terhadap keuangan negara. Otonomi daerah memberikan kebebasan dan keleluasaan terhadap pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya termasuk pengelolaan keuangan daerah, namun disisi lain kebebasan yang diberikan mengandung resiko

terjadinya tindak kecurangan sehingga menggambarkan kekhawatiran terhadap tingginya angka kelemahan SPI yang akan terjadi (Septian, 2009). Menurut Afrian (2016), kinerja pemerintah yang baik akan terlihat dari minimnya pelanggaran yang dilakukan dalam mengelola daerahnya. Artinya pengelolaan dilakukan dengan taat pada prosedur dan ketentuan serta berorientasi pada pengembangan daerahnya.

#### 6. Kinerja Pemerintah Daerah

Otonomi daerah menyerahkan kebebasan dan keleluasaan yang bisa disebut juga pendelegasian kuasa oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna mengembangkan pemerintahannya secara mandiri. Munculnya temuan bahwa pengukuran kinerja merupakan elemen penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik dengan maksimal dikarenakan pengukuran kinerja akan memberikan pandangan mengenai sudah seberapa baik pelayanan yang dilakukan dan aspek mana yang belum terpenuhi (Halachmi, 2005). Pengukuran kinerja akan memberikan gambaran dalam menentukan langkah dari pemerintah daerah ke depannya.

Pelaksanaan otonomi daerah mengharuskan tiap kepala daerah untuk membuat dan memberikan LPPD kepada pemerintah pusat. LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas

pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan merupakan elemen yang termuat dalam LPPD.

Pengukuran atas kinerja dapat dilakukan dengan membandingkan pencapaian yang telah dilaksanakan dengan perencanaan yang dirumuskan sebelumnya (Andani dkk., 2019). Pengukuran akan memerlukan proses analisis data untuk mendapatkan hasil. Proses analisis data yang dilakukan secara sistematis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah disebut dengan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa EKPPD adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penerapan yang dilakukan atas prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif merupakan hal penting dalam menyusun laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sudarsana dan Rahardjo (2013) menarik kesimpulan bahwa metode EKPPD adalah bentuk pengukuran kinerja digunakan dengan melakukan penilaian terhadap total indeks komposit kinerja (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah. “Nilai IKK penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat didefinisikan sebagai penjumlahan hasil

penilaian yang meliputi indeks capaian kinerja dan indeks kesesuaian materi”. Sebagai pengukuran terhadap kinerja pemerintah daerah, indeks capaian kinerja dalam IKK akan memuat mengenai penyusunan sampai dengan realisasi dari kebijakan yang disusun dan digunakan. Manfaat yang diterima bagi pemerintahan adalah untuk evaluasi diri dalam memutuskan dan melaksanakan kebijakan yang sesuai demi kesejahteraan masyarakat.

Pengukuran ini nantinya akan menghasilkan skor kinerja dari masing-masing daerah. Skor kinerja ini juga sering disebut sebagai peringkat kinerja yang akan diurutkan berdasarkan nilai dan disajikan dalam Permendagri.

## 7. **Hipotesis Penelitian**

### a. **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses pembangunan yang berkelanjutan. Pertumbuhan aktif dapat mempromosikan kegiatan dan kegiatan lain, seperti kegiatan investasi di bidang yang mempromosikan pengembangan infrastruktur lokal (Deprianto et. al., 2013). Kondisi ini akan membantu wilayah meningkatkan pendapatan di daerah yang terus mempromosikan sektor lain, mencapai pertumbuhan kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan teori agen, kami memaksa pemerintah daerah untuk meminta pertanggungjawaban mereka atas fakta bahwa

pertumbuhan ekonomi meningkatkan kinerja keuangan wilayah tersebut.

Penelitian Nasution dan Pangabean (2017) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Semakin baik pertumbuhan ekonomi yang diperoleh akan berdampak pada kenaikan kinerja pemerintah daerah. Karena pertumbuhan ekonomi bisa menjadi tolak ukur bagaikan cerminan kinerja dari pemerintah daerah berdasarkan kewajaran LKPD. Dan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan menimbulkan rasa kepuasan kerja dari pemerintah daerah, yang akan berdampak positif terhadap kinerjanya secara keseluruhan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H1: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.**

b. Pengaruh Temuan Audit terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

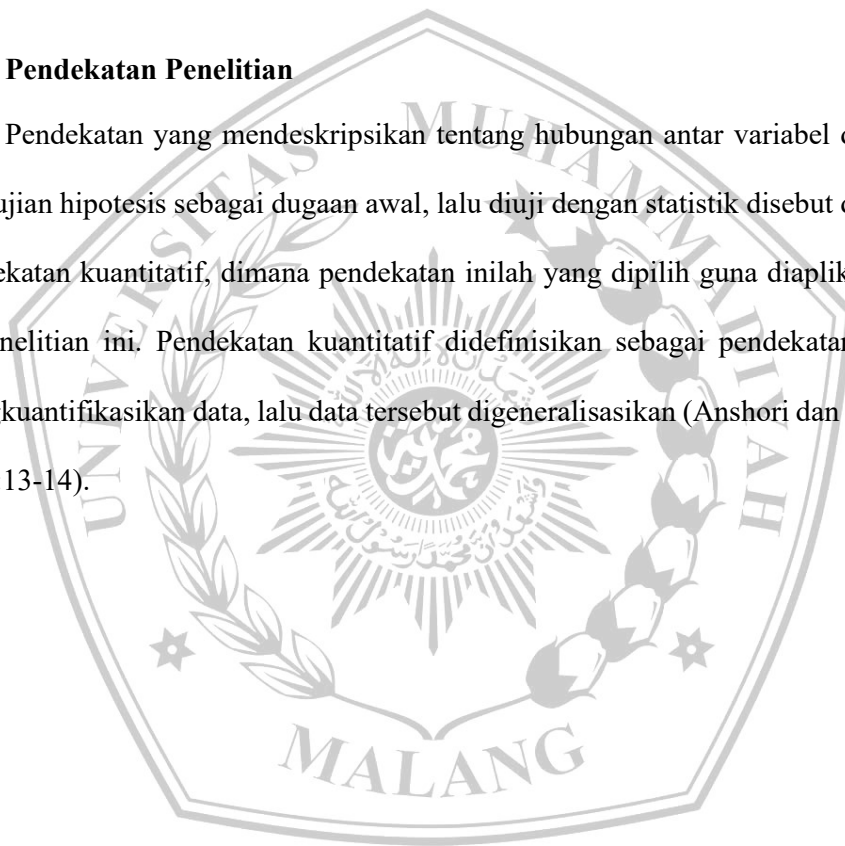
Penelitian Tama (2018) menunjukkan bahwa temuan audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Semakin banyak jumlah temuan audit yang ditemukan dapat disimpulkan menandakan kurang baiknya kinerja pemerintah daerah. Hal ini karena temuan audit memuat pelanggaran-pelanggaran yang mencerminkan perilaku tidak sesuai terhadap hukum yang diterapkan. Kinerja pemerintah yang

baik akan terlihat dari minimnya pelanggaran yang dilakukan dalam mengelola daerahnya (Afrian, 2016). Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H2: Temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah.**

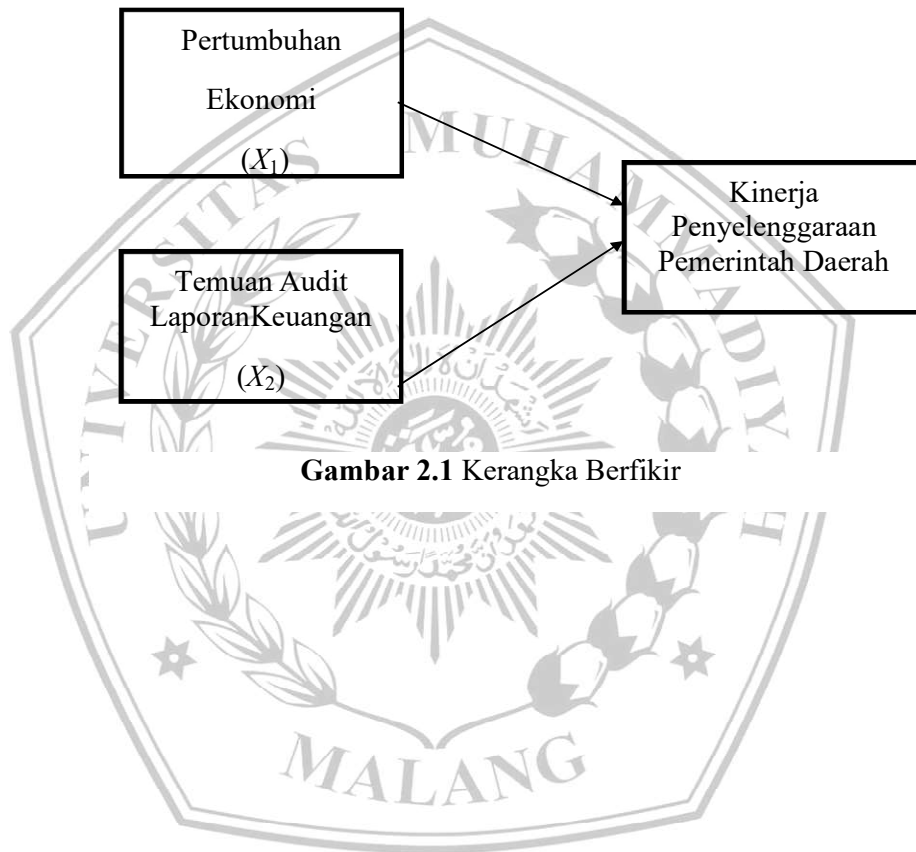
### **C. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang mendeskripsikan tentang hubungan antar variabel dengan pengujian hipotesis sebagai dugaan awal, lalu diuji dengan statistik disebut dengan pendekatan kuantitatif, dimana pendekatan inilah yang dipilih guna diaplikasikan di penelitian ini. Pendekatan kuantitatif didefinisikan sebagai pendekatan yang mengkuantifikasikan data, lalu data tersebut digeneralisasikan (Anshori dan Iswati, 2009:13-14).



1. Model Empiris

Berikut disajikan hubungan antara variabel independen yang meliputi pertumbuhan ekonomi ( $X_1$ ) dan temuan audit ( $X_2$ ) serta variabel dependen yaitu kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (Y) melalui Gambar berikut:



**Gambar 2.1** Kerangka Berfikir